

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dan Pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan belanja daerah sektor Pendidikan di Kabupaten Belu dapat dikatakan baik.

#### **1. Gambaran Pengelolaan Belanja Daerah Sektor Pendidikan di Kabupaten Belu**

Dinas Pendidikan sudah merealisasikan anggaran Belanja Daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk menunjang pengembangan pendidikan di Kabupaten Belu seperti:

- a. Belanja Tidak langsungnya yang terdiri dari: Gaji dan Tunjangan, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru.
  - b. Belanja Langsung yang terdiri dari: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
2. Pengelolaan Belanja Daerah Sektor Pendidikan di Kabupaten Belu Tahun 2017-2021.

Berdasarkan Perhitungan Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian (Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung), Rasio Efisiensi, Rasio Pengelolaan Belanja Keuangan dari formulasi anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Belu tahun 2017-2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

*a. Rasio Efektivitas*

- a). Dilihat dari Tingkat efektivitas pengelolaan belanja tidak langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Belu yang paling Tinggi yaitu pada tahun 2020 sebesar 98% dan dinilai Efektif. Terjadinya Peningkatan presentase efektivitas tersebut disebabkan karena adanya peningkatan kinerja pemerintah di Dinas Pendidikan yang semakin baik dan mampu merealisasikan dan menyalurkan anggaran belanja tidak langsung pada seluruh program atau kegiatan selama periode 2020,realisasi anggaran belanja mendekati sasaran bahkan terealisasi secara optimal seperti yang telah ditetapkan sebelumnya dan dinilai efektif.

Sedangkan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah dinas pendidikan Kabupaten Belu yang paling rendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 85%. Dikatakan paling rendah karena kurangnya kemampuan dalam merealisasikan anggaran belanja pada berbagai program atau kegiatan selama periode 2017 dan dinilai cukup efektif. Angka capaian ini mengidentifikasi bahwa tingkat efektivitas pengelolaan belanja tidak langsung sektor pendidikan di Kabupaten Belu dalam mengelola keuangan daerahnya menjadi semakin efektif dan hampir melampaui Target dan

Terjadi Perkembangan Peningkatan dari Tahun 2017-2020 Dengan demikian dari hasil perhitungan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan belanja tidak langsung Sektor Pendidikan Kabupaten Belu sudah efektif, hal ini ditunjukkan dari hasil rata-rata perhitungan adalah 92%. Agar anggaran belanja menjadi sangat efektif, maka perlu adanya pengawasan dan koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak dalam menyusun anggaran belanja yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan maksimal.

- b). Tingkat efektivitas pengelolaan belanja langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Belu yang paling Tinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 98% Terjadinya Peningkatan presentase efektivitas tersebut disebabkan karena adanya peningkatan kinerja pemerintah di Dinas Pendidikan yang semakin baik dan mampu merealisasikan dan menyalurkan anggaran belanja langsung pada seluruh program atau kegiatan selama periode 2021, realisasi anggaran belanja mendekati sasaran bahkan terealisasi secara optimal seperti yang telah ditetapkan sebelumnya dan dinilai efektif.

Sedangkan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah dinas pendidikan Kabupaten Belu yang paling rendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 91%. Dikatakan paling rendah karena kurangnya kemampuan dalam merealisasikan anggaran belanja pada berbagai program atau kegiatan selama periode 2019 dan dinilai efektif. Angka capaian ini mengidentifikasi bahwa tingkat efektivitas pengelolaan belanja langsung sektor pendidikan di Kabupaten Belu dalam mengelola keuangan daerahnya menjadi semakin efektif dan hampir melampaui Target dan Terjadi Perkembangan

Peningkatan dari Tahun 2019-2021 Dengan demikian dari hasil perhitungan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan belanja langsung Sektor Pendidikan Kabupaten Belu sudah efektif, hal ini ditunjukkan dari hasil rata-rata perhitungan adalah 95%. Agar anggaran belanja menjadi sangat efektif, maka perlu adanya pengawasan dan koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak dalam menyusun anggaran belanja yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan maksimal.

b. Rasio Keserasian

- a) Tingkat Keserasian pengelolaan belanja tidak langsung Sektor Pendidikan Kabupaten Belu ditunjukkan dari hasil rata-rata perhitungan adalah 14%. sedangkan Tingkat Keserasian pengelolaan belanja langsung Sektor Pendidikan Kabupaten Belu ditunjukkan dari hasil rata-rata perhitungan adalah 6%. Dari Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa antar belanja tidak langsung dan belanja langsung belum seimbang. Terbukti dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung daripada belanja yang terkait langsung dengan kegiatan. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, Dan dilihat dari perhitungan Rasio Keserasian Belanja secara normatif, keseimbangan antar belanja belum menunjukkan kata seimbang. Pemerintah Daerah seharusnya lebih cenderung menggunakan dana untuk kegiatan Belanja Langsung yang terdiri dari atas Belanja Pegawai, Belanja

Barang dan Jasa dan Belanja Modal untuk meningkatkan kualitas Output, sehingga fungsi anggaran bisa berjalan dengan baik.

c. Rasio Efisiensi

- a). Tingkat efisien pengelolaan belanja Sektor Pendidikan Kabupaten Belu tidak efisien, hal ini ditunjukkan dari hasil rata-rata perhitungan adalah 208%. Dengan demikian dari hasil perhitungan bahwa tingkat efisien pengelolaan belanja Sektor Pendidikan Kabupaten Belu tidak efisien, karena dilihat dari tingkat presentase tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Belu tidak efisien dalam melaksanakan anggaran belanjanya dan terlalu melebihi anggaran yang tersedia sehingga banyak pengeluaran dana dan penurunan kinerja pemerintah dan juga belum mampu merealisasikan target anggaran belanja sehingga dibiayai dengan pinjaman/hutang.

d. Rasio Pengelolaan Belanja

- a). Tingkat Pengelolaan belanja daerah Sektor Pendidikan Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Belu sudah mengalokasikan dana yang cukup besar pada sektor pendidikan. Besarnya presentase dana sektor pendidikan pun melebihi presentase yang ditetapkan menurut regulasi yakni di atas 20%.

3. Mengenai Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Belanja Daerah Sektor pendidikan di kabupaten Belu;

- a) Faktor pendukungnya adalah ketersediaan Anggaran untuk melaksanakan fungsi pendidikan dan kebudayaan, dan
- b) Faktor penghambatnya yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia baik dari sisi kuantitas dan kualitas dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

bidangnya yang berikut keterbatasan sarana operasional, sarana mobilitas masih kurang dan harapan untuk melakukan monitoring .

## **6.2 Saran**

Dari Kesimpulan di atas, Penulis dapat memberikan beberapa saran-saran yang dapat membantu Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu dalam mengelola anggaran belanja daerah. Berikut saran-saran dari Penulis:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu dapat Meningkatkan dan mempertahankan rasio Efektivitas Belanja yang cukup efektif dan efektif. Peningkatan dapat dilakukan dengan perlu adanya pengawasan dan koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak dalam menyusun anggaran belanja yang telah ditetapkan dan terealisasi dengan maksimal.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu dapat meningkatkan rasio ssssskeserasian belanja tidak langsung dan belanja langsung yang belum seimbang. Peningkatan dilakukan dengan cara pemerintah daerah lebih cenderung menggunakan dana untuk kegiatan belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa dan Belanja Modal untuk meningkatkan kualitas Output, sehingga fungsi anggaran bisa berjalan dengan baik.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu sebaiknya menurunkan rasio Efisiensi yang tidak efisien. Penurunan dilakukan dengan mengurangi pengeluaran dana dalam melaksanakan anggaran belanja yang terlalu melebihi anggaran yang tersedia dan dinas pendidikan mampu merealisasikan target anggaran belanja sehingga tidak ada pinjaman/hutang.

4. Pemerintah kabupaten Belu sebaiknya mempertahankan rasio Pengelolaan Belanja. Karena Pemerintah Kabupaten Belu sudah mengalokasikan dana yang cukup besar pada sektor Pendidikan.
5. Diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu terlebih dahulu menetapkan target jumlah sekolah yang akan disalurkan bantuan anggaran pendidikan sehingga penerapan anggaran bisa maksimal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dima, Enike Tje Yustin. 2021. “*Analisis Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Sektor Pendidikan di Kota Kupang*”, Jurnal ( Kupang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang) hal.29-39
- Djumhana, Muhamad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Edisi pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasbullah.2012. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Liantino, Wita. 2018. *Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah(BPPKAD) di Surakarta*
- Nurdin, Ahmad. 2016. Skripsi. *Studi tentang efektivitas belanja daerah terhadap pelayanan publik pada bidang pendidikan, kesehatan, dan prasarana jalan di Kota Magelang*. Fakultas perencanaan wilayah dan kota, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sutirna, H dan Asep Samsudin. 2015. *Landasan Kependidikan*. Edisi Pertama, Bandung: Refika Aditama.
- Suhardan Dadang, Riduwan, dan Enas. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Edisi Pertama, Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono , Sonny.2010.*Manajemen Keuangan Pemerintah*. Edisi pertama,Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, Eko. 2011. “*Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi*”,Jurnal (Surakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret) hal.29-30
- Trianto, Anton. 2014. *Analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang*. Jurnal.
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Negara.
- PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2021.